

Implementation of the National Community Empowerment Program Mandiri Tourism in the Negeri Amahusu and Latuhalat Kec. Nusaniwe Ambon City

Frety Matahelumual^{1*}, Novita E. Kiljanin², Wiesje Ferdinandus³
Universitas Victory Sorong

ABSTRACT: The research was conducted by Frety Matahelumual, Novita E. Kiljanin and Wiesje Ferdinandus with the title “Implementation of the National Tourism Empowerment Program (PNPM) in Amahusu and Latuhalat Kec. Nusaniwe Ambon City” was conducted to obtain a qualitative description of the implementation of the national community empowerment program that had been carried out. This study aims to determine the implementation process and benefits of the National Community Empowerment Program (PNPM) Mandiri Wisata as one of the empowerment programs in Ambon City. This study uses a qualitative approach at the research locus, namely the Amahusus country and the Latuhat country, the data analysis technique used in this study uses a qualitative descriptive model. The results of the study show that with this program, PNPM Mandiri Tourism in both tourist villages, namely the community can improve the family economy, create jobs and increase village income. Lack of communication and low human resources and budget resources so that the implementation process of the National Community Empowerment Program (PNPM) Mandiri Tourism has not been carried out optimally.

Keywords: Implementation and benefits of PNPM Mandiri Pariwisata

Corresponding Author: fretymatahelumual8@gmail.com

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Pariwisata di Negeri Amahusu dan Latuhalat Kec. Nusaniwe Kota Ambon

Frety Matahelumual^{1*}, Novita E. Kiljanin², Wiesje Ferdinandus³

Universitas Victory Sorong

ABSTRAK: Penelitian dilakukan oleh Frety Matahelumual, Novita E. Kiljanin dan Wiesje Ferdinandus dengan judul "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata di Negeri Amahusu dan Latuhalat Kec. Nusaniwe Kota Ambon" dilakukan untuk mendapatkan deskripsi kualitatif tentang implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi dan manfaat dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata sebagai salah satu program pemberdayaan di Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada lokus penelitian yaitu negeri Amahusus dan negeri Latuhalat, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya program ini PNPM Mandiri Pariwisata pada kedua desa wisata yaitu masyarakat dapat meningkatkan perekonomian keluarga, menciptakan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan desa. Kurang adanya komunikasi dan rendah sumber daya manusia serta sumber daya anggaran sehingga proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata belum maksimal dilakukan.

Kata kunci : impementasi dan manfaat pnpm mandiri pariwisata.

Submitted: 4 April; Revised: 17 April; Accepted: 26 April

Corresponding Author: fretymatahelumual8@gmail.com

PENDAHULUAN

Program PNPM Mandiri Pariwisata merupakan salah satu program pemerintah sebagai suatu bentuk kebijakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan memanfaatkan potensi pedesaan dengan jalan memberdayakan masyarakat lokal dalam mendukung pembangunan pariwisata di suatu desa melalui bidang pariwisata. Karena permasalahan kemiskinan memerlukan suatu penanganan yang komperatif dan melibatkan berbagai sector.

Pemerintah melihat bahwa pengembangan desa wisata pada dasarnya tidak terlalu sulit untuk dapat dikembangkan, karena dalam pengembangan desa wisata itu sendiri bagaimana sebuah desa dapat mengoptimalkan atau menggali potensi dan keunikan yang ada untuk dijual kepada wisatawan. Meilhat hal seperti itu maka yang diperlukan oleh sebuah desa wisata adalah dukungan baik itu berupa pembinaan, kuncuran dana maupun pelatihan.

Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata difokuskan pada pengembangan wilayah dengan sasaran yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh disertai daya tarik wisata dengan berbagai keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan buatan manusia serta ditunjang dengan fasilitas usaha dan industry kreatif menjadi penggerak utama kegiatan kepariwisataan di desa wisata, sehingga PNPM Mandiri Pariwisata diharapkan memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa wisata dan sekitarnya.

Provinsi Maluku memiliki begitu banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan seperti potensi wisata bahari, alam sejarah dan budaya, potensi ini apabila dikembangkan akan menjadi atraksi wisata yang mempunyai nilai jual. Dengan berbagai potensi yang ada maka selayaknya masyarakat lokal dapat terlibat dan juga mendanai penerima manfaat langsung dari industry pariwisata, karena dilihat dari topografi wilayah serta keanekaragaman budaya yang dimiliki maka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata merupakan alternaif yang menjanjikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Di Provinsi Maluku mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah pusat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata lewat dana bantuan langsung kepada desa wisata dari tahun 2011 - 2013 dengan jumlah desa wisata sebanyak 52 desa yang tersebar di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, salah satunya di Kota Ambon sebanyak 5 (lima) desa antara lain Negeri Batu Merah, Negeri Amahusu, Negeri Latuhalat, Negeri Soya dan Negeri Hutumuri, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 1. Desa Wisata Penerima PNPM Mandiri Pariwisata di Kota Ambon.

	PENERIMA	
2011	Desa Batu Merah Negeri Amahusu Negeri Latuhalat	Penerima manfaat terdiri dari kelompok sanggar seni budaya; kuliner; pengrajin souvenir;
2012	Desa Batu Merah	homestay;
2013	Desa Soya Negeri Hutumuri	pemandu wisata;

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penerima bantuan PNPM Mandiri Pariwisata dari tahun ke tahun. Penerima PNPM Mandiri Pariwisata secara umum diperuntukan langsung kepada masyarakat pelaku wisata setempat dan kelompok seni - budaya yang terus untuk melestarikan potensi sumber daya alam serta budaya setempat.

Akan tetapi, apa yang diinginkan dari pemberdayaan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan, yang mana masyarakat yang mendapat bantuan dana untuk meningkatkan taraf kehidupannya lewat sektor pariwisata masih jauh tertinggal dari sektor - sektor yang lain, hal itu menunjukkan bahwa kebijakan tidak dilaksanakan dengan baik, banyak kendala yang terjadi baik dilihat dari sisi komunikasi atau informasi yang disampaikan tidak likukan kepada semua lapisan masyarakat, maupun permodalan yang diberikan tidak transpaansi dan merata.

Dari sisi lain factor sumber daya juga masih sangat terbatas baik dari tingkat birokrasi, fasilitator maupun masyarakat penerima PNPM Mandiri Pariwisata, kalau dilihat dari sisi sumber daya anggaran sangat terbatas sehingga pengawasan oleh tim teknis provinsi maupun kabupaten tidak dilakukan dengan baik.

Dengan persolan yang ada maka peneliti malakukan penelitian yang terkait dengan efektifitas program PNPM Mandiri Pariwisata pada Desa Wisata sejauh mana masyarakat dapat berperan aktif dalam mengelola dan

mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pembangunan pariwisata sehingga tatakelola destinasi dapat berjalan dengan baik.

Oleh sebab itu dengan berbagai permasalahan tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian terhadap Implementasi Program PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata di Kota Ambon, sehingga penulis mengambil judul : “ **IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA DI NEGERI AMAHUSU DAN NEGERI LATUHALAT KEC. NUSANIWE - KOTAAMBON.**

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan dan pembangunan merupakan dua komponen yang saling terkait yang mana merupakan sebuah proses dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Tujuan kebijakan adalah untuk mengubah kondisi yang sudah ada ke arah yang lebih baik. Richar Titmuss mengatakan kebijakan adalah tentang apa yang mungkin kita ubah ; tetang kisan social dalam pikiran manusia.

Istilah kebijakan Publik (publik policy) berasal dari Bahasa Inggris, menurut kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai serangkaian konsep atau asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan pemerintahan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Menurut beberapa ilmuwan menjelaskan tentang kebijakan menurut Ealau dan Prewit (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mantaatinya. Demikian juga Richard Rose yang dikutip Wiliam Dunn (disadur Darwin, 1995) mengatakan bahwa, kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang isu yaitu arah tindakan actual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik diantara kelompok masyarakat. Menurut Thomas R. Bye (Winarno 1982 : 2) menjelaskan bahwa suatu kebijakan dapat menjadi kebijakan publik kalau tidak dirumuskan, disahkan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah seperti legistatif, eksekutif dan yudikatif (dalam Sunggono, 1994 ; 25). sedangkan Andesson (1975) mendefenisikan kebijakan publik sebagai kebijakan - kebijakan yang dibangun oleh badan - badan dan pejabatan - pejabat pemerintah. Sehingga dapat dikatakan implekasi dari kebijakan - kebijakan tersebut merupakan penetapan atau tindakan pemerintah yang mana tidak hanya dinyatakan tetapi harus dilaksanakan dan dilandasi dengan maksud dan tujuan yang tepat bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Implemntasi kebijakan merupakan suatu cara dalam

memahami apa yang terkait dengan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pariwisata yang merupakan produk dari kebijakan publik yang terkait secara langsung dan pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan oleh sebab itu segala bentuk kebijakan publik yang dibuat harus dilakukan dengan baik sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Dalam masyarakat keberhasilan implementasi kebijakan sebagian besar berasal dari kebijakan dan perencanaan. Untuk memaksimalkan kebijakan tersebut, maka diperlukan suatu kajian tentang implementasi kebijakan.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak atau akibat terhadap apa yang dilakukan untuk menimbulkan dampak dan akibat itu dapat berupa undang - undang peraturan pemerintah, keputusan yang dibuat oleh lembaga - lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008 : 65) Implementasi adalah tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil dari program - program tersebut dengan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi, dimana berbagai aktor, organisasi bekerja bersama - sama untuk dapat menjalankan kebijakan sehingga maksud dan tujuan dapat tercapai. Demikian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan bukan hanya terkait dengan mekanisme dari keputusan politik ke dalam proses birokrasi melainkan pada masalah dan aspek perwujudan kebijakan serta dalam kondisi pada saat kebijakan itu dibuat, siap yang membuat dan bagaimana kebijakan itu di implementasikan. Yang mana tahapan dari implementasi kebijakan akan memunculkan konsekuensi yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu konsekuensi positif dan negatif.

PNPM Mandiri Pariwisata

PNPM Mandiri Pariwisata merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan pada kepatuhan mandat nasional yang menjadi dasar pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan PNPM Mandiri Pariwisata mampu membangun kesadaran masyarakat dalam penguatan kelembagaan sehingga mampu menjadi pelaku yang handal dalam usaha kepariwisataan.

Pariwisata mempunyai karakteristik berupa potensi dan kekuatan yang melekat sebagai berikut :

1. In - situ
2. Rantai nilai ke depan dan ke belakang yang sangat panjang
3. Industri yang berbasis sumber daya lokal (local resource industry).

Berpijak dari sifat dan kekhasan serta besarnya potensi yang ada maka bidang pariwisata sangat strategis untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengsinergikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang dikoordiner oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan pariwisata RI Nomor KM. 18./HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata yang mana fokus pengembangan pada wilayah sasaran yang memiliki keanekaragaman kekayaan alam, budaya maupun fasilitas usaha pariwisata yang merupakan penggerak utama aktifitas kepariwisataan di desa wisata. Oleh sebab itu tujuan dari PNPM Mandiri Pariwisata yaitu : Meningkatkan kemampuan, menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat di bidang pariwisata secara khusus dapat dijabarkan

1. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan keswadayaan setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah melalui usaha kepariwisataan
2. Meningkatkan kemampuan dan kreatif masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi social dan budaya serta kearifan lokal untuk dapat memberdayakan diri sendiri
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berbasis masyarakat.
4. Membangun kemitraan lintas sector untuk melakukan akselerasi pembangunan kepariwisataan di wilayah binaan.

Adapun pengertian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program - program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

PNPM Mandiri Pariwisata adalah bagian dari PNPM Mandiri yang pelaksanaannya melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dan pemberian bantuan langsung masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan kepariwisataan di desa wisata, desa sekitar daya tarik dan desa sekitar usaha pariwisata.

Pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya (dikutip dari KM. 18./HM.001/MKP/2011

), Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Negeri Amahusu dan Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota. Peneliti mengambil ke dua lokasi tersebut karena merupakan desa wisata di Kota Ambon yang secara langsung menerima PNPM Mandiri Pariwisata.

Jenis penelitian

Dari segi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini berupaya untuk menggambarkan tujuan dan manfaat dari penelitian serta teknik pengumpulan data penelitian. Dengan judul " Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM) Mandiri Pariwisata di Negeri Amahusu dan Latuhalat Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder :

1. Data Primer Merupakan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui wawancara dan observasi dan pengamatan langsung di lapangan
2. Data Sekunder merupakan Data sekunder yaitu melalui berbagai laporan tertulis dan dokumen - dokumen lainnya berupa peraturan Perundang - undangan, dokumen, laporan- laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan kepariwisataan.

Instrumen Penelitian

Dalam setiap penelitian, Peneliti adalah alat pengumpul data yang utama dengan kata lain peneliti adalah Instrumen Penelitian,yakni dalam usaha pengumpulan data. Selain itu dalam penelitian ini digunakan Pedoman Wawancara, catatan lapangan dan koneksi internet sebagai instrumen penelitian yang lain.

HASIL PENELITIAN

I. Proses Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan program PNPM Mandiri Pariwisata di Provinsi Maluku Kota Ambon umumnya ditinjau dari sisi proses dan tujuan kebijakan belum terakomodir dengan baik, dengan kata lain masih terdapat kegagalan dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan dari program pemberdayaan masyarakat dibidang pariwisata belum tercapai.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa program dari PNPM Mandiri Pariwisata merupakan kebijakan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui desa wisata. Program ini mulai dilaksanakan di Provinsi Maluku tahun 2011 dan tersebar di 11 Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengemukakan hasil penelitian yang dapat disampaikan bahwa kalau dilihat dari sudut pandang kelembagaan sudah menyiapkan berbagai aturan dan tatalaksana kerja kepada para pelaksana berdasarkan fungsi dan tugas dalam proses pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri di negeri penerima bantuan.

Salah satu yang dapat dianalisis dari penelitian ini adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, yang mana menjelaskan tentang organisasi pelaksana PNPM Mandiri Pariwisata sebagai berikut :

1. Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dan dalam melaksanakan fungsinya dan perannya dilengkapi dengan sekretariat PNPM Mandiri Pariwisata.
2. Konsultan Manajemen, tugasnya membantu Dirjen Pengembangan Destinasi dalam proses pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip - prinsip, kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku yang bertugas melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan Dinas pada Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri dan dilengkapi dengan Tim Teknis Provinsi. Selain itu juga melakukan usulan desa wisata yang berada pada wilayah Kabupaten/Kota sebagai penerima PNPM Mandiri Pariwisata pada tahun berikutnya.
4. Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata bertugas :
 - a. Menetapkan Tim teknis Kabupaten/Kota.
 - b. Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
5. Fasilitator bertugas melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. Fasilitator adalah orang yang mempunyai keahlian dan pengalamam dalam melaksanakan program PNPM. Berdasarkan hasil penenelitian yang ada maka maka diperoleh keterangan bahwa tugas dari fasilitator adalah :
 - a. Melakukan pendampingan kepada kelompok penerima
 - b. Membantu LKM untuk membuat proposal kegiatan
 - c. Melakukan pendampinagn kepada kelompok penerima PNPM Mandiri Pariwisata
 - d. Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan
 - e. Melakukan koordinasi dengan konsultan terkait pelaksanaan kegiatan yang berhubungan secaralangsung dengan kelompok penerima.
6. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleg masyarakat dan bertugas meneglola pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata di desa penerima bantuan.
7. Kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan masyawarah/ rembung warga yang difasilitasi lewat LKM.

Sementara dalam keputusan Peraturan Menteri kebudayaan dan Pariwisata RI Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman PNPM Mandiri

Pariwisata menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan indikator kinerja kebijakan ini. Kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata secara umum bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya melalui usaha kepariwisataan, sedangkan sarana dari PNPM Mandiri Pariwisata, yaitu meningkatkan kapasitas kemampuan dalam berusaha dan berkarya masyarakat di desa wisata dan sekitarnya, yang mencakup wilayah pedesaan atau kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan fungsi dan peran, sehingga masyarakat miskin yang berdomisili di sekitar daya tarik wisata atau pusat kegiatan kepariwisataan dapat meningkatkan kesejahteraannya

Dalam keputusan tersebut ada beberapa indikator keberhasilan PNPM Mandiri Pariwisata antara lain

- a. Masyarakat dapat memahami PNPM Mandiri Pariwisata dan pembangunan pariwisata berkelanjutan
- b. Dapat merumuskan secara partisipatif dokumen perencanaan desa serta membuat orientasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata
- c. Tersalurkannya dana bantuan kepada desa wisata secara transparansi serta diprioritaskan kepada kelompok masyarakat miskin yang bergerak pada sektor pariwisata.
- d. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
- e. Terciptanya lapangan kerja melalui usaha pariwisata.

Dalam penelitian ini ada beberapa informan yang relevansi dalam studi implementasi kebijakan yaitu informan pelaksana dan penerima manfaat sesuai dengan siklus kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata, dengan demikian pada penelitian ini akan dipaparkan hasil wawancara terhadap tim teknis Provinsi, tim teknis Kota Ambon, Raja Negeri Amahusu, Raja Negeri Latuhalat, fasilitator dan masyarakat penerima PNPM Mandiri Pariwisata.

a. Pemahaman Informan tentang PNPM Mandiri Pariwisata

Pemahaman informan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata merupakan bagian dari program pemerintah terhadap masyarakat yang mana merupakan kegiatan mikro yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bergerak dibidang pariwisata, hal tersebut dapat dilihat dari wawancara yang mendalam dengan tim teknis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku Ibu Yeti :

“ Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata merupakan suatu program pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat lewat bantuan langsung kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di desa wisata maupun desa sekitar yang secara tidak langsung mendapat dampak dari program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang mana dijelaskan bahwa program PNPM Mandiri Pariwisata adalah program yang bagus di Provinsi Maluku dimana Maluku dikenal sebagai daerah yang kaya dengan potensi alam, budaya dan sejarah sehingga dengan adanya program ini masyarakat yang ada di desa wisata dapat mengembangkan diri mereka lewat

potensi pariwisata yang ada, sehingga dapat mensejahterakan dan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup lewat sektor pariwisata.

Dari sisi lain informan menjelaskan bahwa dengan adanya program PNPM Mandiri pariwisata maka desa - desa yang memiliki potensi wisata dapat berkembang lewat usaha - usaha yang bergerak di bidang pariwisata, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Jemi Tohata selaku tim teknis Dinas :

“ Dengan adanya program PNPM Mandiri Pariwisata di Kota Ambon memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kegiatan pariwisata yang ada di desa mereka lewat bantuan dana yang diterima “

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut nampaknya pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka, dan sesuai dengan hasil pengamatan peneliti saat melakukan

Pengamatan terhadap masyarakat penerima bantuan pada umumnya ada perubahan walaupun masih jauh dari yang diharapkan pada daerah - daerah yang memiliki daya tarik wisata. Hal ini sangat bermanfaat dengan adanya program PNPM Mandiri Pariwisata seperti apa yang dipaparkan oleh informan Bapak Yonas Soplanit yang mengatakan bahwa

“ Katong sangat senang dengan adanya program PNPM Mandiri Pariwisata yang mana dalam pencairan uang langsung ke rekening BRI milik kelompok yang sudah dibentuk, kemudian dibantu dengan fasilitator desa melakukan pembagian berdasarkan program yang sudah ada.

Seperti apa yang dikemukakan dari hasil wawancara dikatakan bahwa masyarakat dapat menerima manfaat dari program tersebut, bahkan dari sebagian memiliki pemahaman bahwa betapa penting dan perlunya ada program ini walaupun belum bisa dilakukan secara maksimal karena pelaksanaannya hanya dilakukan selama 3 tahun.

b. Proses Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pariwisata

Kalua kita berbicara mengenai proses pelaksanaan implemtasi kebijakan dari program PNPM Mandiri Pariwisata di Kota Ambon pada kedua negeri yang dijadikan sebagai salahsatu desa wisata penerima PNPM Mandiri Parwisata, dengan melihat berbagai permasalahan lapangan yang ditelusuri melalui wawancara dengan informan tentang mekanisme dalam menentukan kelompok sasaran dari program.

PNPM Mandiri Pariwsata

Menurut Ibu Yeti tim teknis Provinsi menjelaskan bahwa

“ Dalam menentukan lokasi atau desa yang akan dijadikan sebagai sasaran penerima bantuan PNPM Mandiri Pariwisata yaitu kami dari Dinas Provisini mengusulkan nama - nama desa yang selama ini sudah melakukan aktifitas pariwisata, dan juga mempunyai keterkaitan dengan desa yang meliki daya tarik wisata, setelah itu data tersebut di kirim ke Kementerian Kebudayaan Pariwisata RI,

Dalam proses pelaksanaan yang dilakukan di Kota Ambon hanya difokuskan pada identifikasi desa - desa yang melaksanakan aktifitas pariwisata

juga memiliki daya tarik wisata serta adanya kunjungan wisatawan yang mana dianggap perlu untuk mendapat bantuan dari program PNPM Mandiri Pariwisata sehingga pelaksanaannya lebih awal, hal ini dilakukan agar untuk mencapai efektifitas program dan juga tepat sasaran serta memperoleh hasil yang efisien. Walaupun pada kenyataannya program PNPM Mandiri Pariwisata pada Negeri Amahusu masih terdapat berbagai kendala dalam mencapai tujuan dari program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan dan monitoring yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya dari fasilitator PNPM Mandiri Pariwisata Bapak Antony Siloy menuturkan tentang bagaimana proses dalam menentukan kelompok penerima bantuan maupun proses penyaluran bantuan kepada kelompok maupun individu di negeri Amahusu yang mengatakan bahwa " Kami mengumpulkan kelompok masyarakat yang bergerak atau berusaha di bidang pariwisata antara lain kelompok kuliner, sangar seni, kerajinan tifa, untuk mendengar sosialisasi yang disampaikan oleh tim fasilitator dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Ambon tentang program PNPM Mandiri Pariwisata, dan didalam pertemuan tersebut kami langsung membentuk tim pengelola kegiatan (TPK) dengan surat keputusan dari tim teknis.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh tim teknis Kota Ambon dalam memberikan informasi tentang program PNPM Mandiri Pariwisata kepada masyarakat desa, walaupun dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut masih jauh dari yang diharapkan karena berdasarkan PTO bahwa sosialisasi harus dilakukan oleh konsultan manajemen, tim teknis Provinsi dan Kota Ambon kepada semua masyarakat, bukan saja kepada kelompok penerima bantuan dari program PNPM Mandiri Pariwisata.

Berdasarkan SK tim teknis, maka dibuatlah proposal sebagai salah satu persyaratan untuk pencairan dana berdasarkan kelompok penerima yang telah dibentuk pada saat rekrutmen warga. Dengan demikian proses pelaksanaan dalam pengelolaan dana tersebut selama ini diserahkan sepenuhnya kepada kelompok yang telah dibentuk berdasarkan surat keputusan dan kemudian diberikan kepada kelompok penerima sasaran. Hal ini sesuai dengan data yang didapat saat peneliti melakukan wawancara dengan tim fasilitator negeri Amahusu tentang penentuan bantuan yang diberikan berdasarkan rencana usulan kegiatan yang disampaikan dari tiap - tiap kelompok penerima.

Pelaksanaan kegiatan PNPM mandiri di Negeri Amahusu nampaknya sudah berjalan dengan baik dan dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa tahapan pelaksanaan sudah jelas yang mana mulai dari penentuan kelompok penerima, data, penentuan kelompok penerima sampai dengan penguncuran dana yang dimaksud.

Manfaat Program PNPM Mandiri Pariwisata

pernyataan dari salah seorang kelompok penerima bantuan dari program PNPM Mandiri pariwisata mengatakan bahwa kegiatan ini sangat baik sehingga perlu ditindaklanjuti atau dilaksanakan kembali karena memberikan nilai

yang positif bagi masyarakat yang bergerak pada usaha pariwisata yang ada di desa wisata, demikian wawancara yang disampaikan oleh Ibu Yoti Tomasila

“Program PNPM Mandiri Pariwisata sangat baik karena dengan adanya program ini katong yang sebelumnya cuma memiliki beberapa alat untuk katong bakar sagu sekarang sudah bertambah sehingga kalau ada pesanan yang banyak katong bisa layani, juga dengan adanya program ini bisa tambah orang untuk membantu dan menjual hasilnya “ (7 Januari 2017).

Informasi yang disampaikan oleh ketua kelompok kuliner diatas yang juga sebagai penerima bantuan dari program PNPM Mandiri Pariwisata menjelaskan bahwa pada dasarnya mereka sangat senang dengan adanya bantuan dari program PNPM Mandiri Pariwisata karena dapat mampu meningkatkan taraf hidup dan menciptakan lapangan kerja

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua kelompok pengelola daya Bapak Petrus Siloy tarik wisata Batu Lobang Bapak Petrus Siloy yang mana sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan bahwa :

“ Program ini sangat membantu sekali karena katong dapat membangun sarana dan prasarana pariwisata di daya tarik Batu Lobang seperti pembuatan trap

- trap dan talut sehingga pengunjung yang datang lebih banyak karena jalan sudah bagus dan katong bisa dapat pemasukan dari jumlah pengunjung yang datang ke daya tarik tersebut “

Sesuai pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa sebelum adanya program PNPM Mandiri Pariwisata di Negeri Amahusu kegiatan pariwisata sangat terbatas dan pendapatan dari masyarakat cenderung tidak menentu, oleh karena itu dengan adanya program ini di desa menjadi peluang yang sangat besar bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka karena dengan adanya kegiatan pariwisata dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat bukan saja bagi desa wisata yang menerima bantuan program PNPM Mandiri Pariwisata tetapi juga bagi desa sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan informan maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan program PNPM Mandiri Pariwisata di Negeri Amahusu kecamatan Nusaniwe Kota Ambon adalah sebuah program yang sangat baik dimana membantu masyarakat miskin untuk dapat berusaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka lewat usaha pariwisata.

Dengan demikian diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali sehingga masyarakat yang telah menerima bantuan dari program tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan, karena program PNPM Mandiri Pariwisata memberikan efek yang positif bagi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata yang lebih baik sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dicapai dan juga diharapkan adanya kepedulian pelaksanaan proses implementasi program tersebut.

Deskripsi Negeri Latuhalat

a. Pemahaman Informan Tentang PNPM Mandiri Pariwisata

Pemahaman seorang terhadap apa yang diketahuinya akan membantu mereka dalam berinovasi dan kreatif untuk mencari sesuatu yang baru sesuai dengan bakat dan keinginan mereka. Berdasarkan permasalahan yang ada bagaimana masyarakat dapat mengimplementasikan kebijakan pemerintah PNPM Mandiri Pariwisata terutama bagi masyarakat penerima maupun pengelola kegiatan yang menjadi informan tentang program ini.

Sesuai hasil observasi dan wawancara informan dengan peneliti yang mana dijelaskan bahwa pada dasarnya sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang kebijakan pemerintah tentang PNPM Mandiri Pariwisata, yang mana program ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, walaupun dalam pelaksanaan masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Hal ini disampaikan oleh satu staf negeri jemi Lekatompessy yang mengatakan bahwa

“ Program ini cukup baik karena sangat membantu masyarakat yang mata pencaharian mereka sebagai pelaku usaha kecil dan menengah yang berusaha di daya tarik wisata yang ada maupun pelaku kreatif yang ada di negeri Latuhalat “ (9 Januari 2017)

Sesuai dengan hasil data wawancara dengan informan yang dijelaskan bahwa pada dasarnya program PNPM Mandiri Pariwisata baik dan merupakan kebijakan pemerintah yang sangat membantu masyarakat. Namun kalau kita kaitkan dengan permasalahan yang ada maka tidak dipungkiri bahwa kebijakan tersebut dilakukan dengan baik. Karena kalau dilihat hanya sebagian masyarakat saja yang memahami dan mengetahui kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata.

Sesuai dengan hasil analisis yang peneliti lakukan yaitu masyarakat pada umumnya hanya melakukan program PNPM Mandiri Pariwisata sebagai salah satu wadah atau upaya untuk meningkatkan dan merubah pola usaha mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan salah seorang penerima bantuan pengrajin bunga cekik Bapak

‘ Sebelum dapat bantuan b kerja sendiri, dan waktu ada bantuan b disuruh buat kelompok kerajinan bunga cengkih dan di dalam kelompok katong 5 orang, waktu itu bantuan yang diberikan berupa uang tunai yang mana tahun pertama katong Cuma dapat 2.000.000,- tahun kedua cuma Rp. 100.000,- bagaimana bisa katong bisa tarus berkembang sedangkan beli cengkih saja mahal...”

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih memahami bahwa dengan adanya bantuan ini mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka lewat bantuan tunai yang diberikan, bukan hanya sekedar saja dibuat untuk formalitas dalam proses pencairan dana saja tetapi lebih dari itu yang mereka inginkan ketersediaan dana yang diberikan harus dilakukan secara baik dan transparansi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa program PNPM Mandiri Pariwisata sangat baik dan efektif walaupun dalam pelaksanaannya banyak ditemukan kendala hal ini disampaikan oleh tim fasilitator desa Bapak Edy Kastanya yang mana dijelaskan bahwa kami dalam

pelaksanaan suda kami berupaya semaksimal mungkin dilapangan walaupun sangat sulit untuk memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat penerima (10 Januari 2017). Hal ini dapat dikatakan bahwa tugas dari aktor kebijakan terutama fasilitator desa masih jauh dari yang diharapkan sehingga pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat belum optimal sesuai dengan arahan kebijakan.

Proses Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pariwisata.

Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata di Negeri Latuhalat pada hakekatnya merupakan proses inplementasi kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata yang merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada masyarakat di desa wisata. Selama 2 tahun negeri Latuhalat melaksanakan program tersebut dan mendapat dukungan positif dari masyarakat karena dapat membatu masyrakat terutama yang bergerak di usaha pariwisata pada daya tarik wisata yang ada di negeri Latuhalat.

Lebih lanjut informasi disampaikan oleh ketua kelompok kuliner yang melakukan aktifitasnya di pantai Namalatu sebagai salah satu kelompok penerima Ibu Del Soplantila

“..... Bantuan yang katong dapat berupa uang tunai itu waktu tahapan pertama dan tahap kedua katong dibelikan langsung lemari kaca untuk tempat berjualan. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak anggota yang tidak aktif dalam melakukan aktivitas usahanya. (12 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat dikatakan bahwa pemebrian bantuan yang diberikan sudah sesuai namun ada berbagai kendala yang dihadapi yang mana masyarakat penerima bantuan sebagian tidak bisa mengelola dengan baik hal tersebut menyebabkan pengembangn usaha tidak dapat berkembang dan tidak bisa memeberikan kontribusi lewat peningkatan pendapatan keluarga.

Kalau kita mengkaji dan melihat selama proses pelaksanaan program PNPM Madiri Pariwisata di desa wisata Latuhalat sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan panduan yang ada walaupun ada berbagai kendala atau masalah yang terjadi dilapangan hal tersbut diakibatkan kurang adanya monitoring yang dilakukan oleh pengambil kebijaknan baik di tingak desa, Kota maupun Provinsi sebagi lagistalor dari kebijakan ini.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan suvei dilapangan dapat dikatakan bahwa bahasil tidaknya suatu program apabila tidaka dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan yang ketat kepada masyarakat yang secara tidak langsung mandapat dampak dari program PNPN Mandiri Parwisata. Dengan demikinan harus ada koordinasi antar tim teknis Provinsi, Kota maupun fasilitaror serta kelompok penerima sehingga program ini bisa berjalan dengan baik.

Manfaat dari Program PNPM Mandiri Pariwisata

Manfaat dari program PNPM Mandiri Pariwisata di negeri Lathalat yang dilakukan selama dua tahun dari tahun 2011 - 2012 mendapat perhatian yang baik dari semua masyarakt walauun dalam dari setiap kegiatan yang dilakukan adanya yang mandapat manfaat lewat peningkatan ekonomi keluarga lewat

pendapatan yang diterima maupun menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan hasil yang didapat oleh peneliti dilapangan sesuai apa yang disampaikan oleh satu ketua kelompok yang pengelola daya tarik wisata pantai Batu Gonde yang mengatakan bahwa “ Beta sangat berterima kasih dengan adanya program ini dulu di beta punga daya tarik ini belum ada shelter untuk pengunjung malakukan aktifitas wisata n namun setela ada dibangun pengujung mulai banyak datang disini sehingga b bisa mendapat hasil yang baik. Berdasarkan hasil wawancaradilapangan peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dengan adanya progam PNPM Mandiri Pariwisata sangat memberikan manfaat sehingga membawa perubahan di dalam masyarakat, walaupun dari sisi lain bantuan tersebut hanya diberikan kepada sebagian masyarakat yang melakukan usaha di daya tarik wisata yang ada di negeri Latuhalat.

Manfaat dari program PNPM Mandiri Pariwisata di Negeri Latuhalat secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan dari para pelaku usaha pariwisata yang ada, disampaikan oleh pengrajin bunga cengkih yang menuturkan bahwa

“ Bantuan yang diberikan memberikan maaf bagi kami yang dulu b Cuma sendiri tetapi sekarang sudah menjadi 5 orang dalam melakukan usaha tersebut, walaupun anggaran yang diberikan bagi katong untuk penambahan modal masih kurang, tetapi tetap katong berusaha untuk dapat menghasil satu produk yang baik dan bisa dijual untuk menamba pengasilan keluarga”(12 Januari 2017)

Berdasarkan apa yang disampaikan informan dapat disimpulkan bahwa program PNPM Mandiri Pariwisata yang di lakukan di negeri Latuhalat memiliki manfaat yang baik bagi para pelakuk usaha yang ada karena dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan walaupun masih kurang dari sisi anggaran yang diberikan sebagai modal usaha.

Dengan kata lain factor sumber daya dan sumber daya manusia merupakan factor yang penting dalam meningkatkan kapastas usaha masyarakat di suatu daerah, yang mana dapat dikatakan bahwa program PNPM Mandiri Pariwisata menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dari program tersebut. Secara sederhana berdarakan gambaran diatas dapat disimpulkan output juga dampak dari program PNPM Mandiri Pariwisata di Kota Ambon Negei Latuhalat adalah sebagai berikut :

1. Output :

Tersalurnya bantuan langsung kepada masyarakat penerima yang dibagi dalam kelompok

- a. Kuliner
- b. Suvenir/Kerajinan
- c. Daya tarik Wisata

2. Outcame :

- a. Meningkatkan pendapatan keluarga
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pariwisata di daya tarik wisata.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Program Nasional PNPM Mandiri Pariwisata

Berdasarkan apa yang disampaikan dapat dikatakan dalam menyampaikan informasi tentang PNPM Mandiri Pariwisata sudah dilakukan secara baik kepada pelaksana maupun penerima dalam hal ini kelompok masyarakat sehingga mereka dapat dengan mudah memahami tentang kebijakan dari PNPM Mandiri pariwisata.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan dapat dikatakan bahwa pada kenyataannya pada kedua negeri penerima program PNPM Mandiri khususnya negeri Amahusu masih baik melaksanakan program tersebut berdasarkan arahan sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, dibandingkan dengan Latuhalat yaitu tidak melakukan informasi dengan baik dan merata kepada semua masyarakat sehingga apa yang diharapkan dari tujuan program PNPM Mandiri Pariwisata tidak berjalan dengan maksimal

Dengan demikian itu dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dari suatu kebijakan di masyarakat adalah implementator mengetahui apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi, yang mana dapat diketahui bahwa tujuan dari program PNPM Mandiri Pariwisata adalah Meningkatkan kemampuan, menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat di bidang pariwisata sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih kurang adanya koordinasi antar pendamping dengan penerima manfaat juga antar implementator dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata di Negeri Amahusu dan Latuhalat Kota Ambon.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan salah satunya faktor sumber daya. Menurut Edwar III dalam Widodo (2010 : 98) bahwa sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

Sumber daya dapat diposisikan sebagai input didalam sebuah kebijakan sehingga menjadi suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis.

Secara ekonomis sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang mengrefesikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya kedalam output, sedang secara teknologis sumber daya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi (Tachjan 2006 : 135)

Menurut Edwart III dalam Agustino (2006 : 150 - 159) mengatakan bahwa sumber daya merupakan suatu hal penting dalam implementasi kebijakan. Indikator yang mempengaruhi sumber daya terdiri dari

1. Sumber Daya Manusia

Edwar III dalam Widodo (2010 : 98) mengatakan sumber daya yang paling penting dalam implementasi adalah sumber daya manusia, dimana kejelasan dan konsistensi implementasi kebijakan serta keakuratan dalam mengimplementasikan kebijakan menjadi tidak berguna jika pelaksana kebijakan tidak melaksanakan kebijakan itu.

Sumber daya manusia yang dimaksudkan disini adalah fasilitator dan masyarakat penerima PNPM mandiri Pariwisata yang ada di negeri Amahusu dan Latuhalat. Fasilitator sebagai pihak yang langsung terlibat dengan masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus memantau proses pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa fasilitator memiliki pemahaman tentang program tersebut, hal ini dapat dibuktikan lewat wawancara yang disampaikan oleh salah satu penerima PNPM Mandiri Pariwisata negeri latuhalat kalau fasilitator desa selama kegiatan berlangsung sering datang control dan juga memberikan masukan par katong dalam membuat proposal maupun laporan pelaksanaan.

Berdasarkan wawancara maka dapat dikatakan bahwa fasilitator yang ada di negeri Amahusu sudah menjalankan tugas yang harus dijalankan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata. Lain halnya dengan fasilitator maupun penerima manfaat di negeri Latuhalat dalam pelaksanaan program masih jauh dengan yang diharapkan sehingga tujuan dari program PNPM Mandiri Pariwisata tidak berjalan dengan maksimal.

Selain dari sumber daya pelaksana atau fasilitator sebagai bagian dari implementator kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata juga masyarakat atau kelompok penerima perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai sehingga peningkatan kapasitas usaha dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi lapangan dapat dikatakan bahwa pelaku usaha atau kelompok masyarakat yang mendapat bantuan dari PNPM Mandiri Pariwisata kalau dilihat dari manfaat yang didapat hanya sebatas untuk biaya makan sehari - hari dan mungkin sebagian hasil yang didapat digunakan sebagai biaya sekolah oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya manusia oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia lewat berbagai pelatihan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan fakta yang ada pada umumnya masyarakat kelompok penerima PNPM Mandiri Pariwisata pada negeri Latuhalat belum menyadari tentang bantuan yang diberikan lewat program PNPM Mandiri Pariwisata, bahkan dalam pelaksanaan belum bisa bekerja secara berkelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan hal tersebut disampaikan oleh ketua kelompok sadar wisata yang bergerak pada kelompok kuliner bapak Maku Opier yang menjelaskan bahwa “ di kelompok kami yang menjadi permasalahan pertama masalah anggaran yang katong dapat tidak cukup dalam membeli peralatan yang lebih baik, juga anggota kelompok tidak bisa bekerja mereka tinggal tunggu kalau ada pesanan saja. (12 Januari 2017)

Kualitas dari masing - masing kelompok penerima merupakan salah satu persyaratan utama dalam mencapai keberhasilan dari program PNPM Mandiri Pariwisata, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dari program maka motivasi dari masyarakat untuk dapat bekerjasama untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka sehingga tujuan dari program PNPM Mandiri Pariwisata dapat tercapai dengan maksimal.

Dalam persoalan kalau dilihat dari konteks sumber daya dari penerima program dapat dilihat sejauh mana masyarakat berperan aktif dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program hingga sampai pada evaluasi kegiatan.

Hal ini dapat diukur dari semakin tinggi partisipasi masyarakat terhadap program PNPM Mandiri Pariwisata maka semakin berkualitas dan bermanfaat program tersebut, juga sebaliknya apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah maka dapat menghasilkan program yang buruk juga

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata yang dilaksanakan pada negeri Amahusu dan Latuhalat menggunakan petunjuk teknis operasional (PTO) pelaksana PNPM Mandiri Pariwisata tahun 2010, hal tersebut disampaikan oleh fasilitator negeri Latuhalat adalah “ dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata kami melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diinginkan “ 21 Januari 2017

Sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa apa yang dikerjakan sudah sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis operasional, kedua pedoman diatas dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri yang mana dapat dijabarkan dari mulai pelaksanaan program sampai pada tahapan evaluasi. Selain itu juga tim teknis yang ada di tingkat provinsi dan Kabupaten Kota ditunjuk untuk dapat membantu proses pelaksanaan program pada desa - desa wisata dan juga para petugas pengelola sudah melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu Implementasi Program PNPM Mandiri Pariwisata di Negeri Amahusu dan Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan wawancara dan observasi dengan informan lapangan maka dapat disimpulkan

1. Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pariwisata yang dilakukan pada kedua negeri yang ada di Kota Ambon secara umum memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga menciptakan lapangan kerja juga meningkatkan pendapatan serta meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

2. Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata yang dilakukan di Negeri Amahusu sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat permasalahan pada komunikasi informasi yang kurang efektif dari pelaksana kegiatan serta terdapat kekurangan pada sumber daya anggaran sehingga tujuan dari program tersebut belum maksimal tercapai.

3. Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata yang dilaksanakan di negeri Latuhalat sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan walaupun ada beberapa kendala atau masalah pada sumber daya anggaran dan sumber daya manusia sehingga menjadi penghambat implementasi dari program PNPM Mandiri Pariwisata.

4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pariwisata sehingga implementasi dari program tersebut tidak berjalan dengan maksimal.

5. Manajemen pariwisata belum dilakukan dengan baik, sehingga anggaran yang diberikan tidak dapat memperdayakan masyarakat dengan maksimal.

6. Proses monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan baik, sehingga implementator dapat menjalankan tugas dan fungsi agar pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pariwisata dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari program tersebut.

Rekomendasi

1. Perlu adanya komunikasi dalam hal ini koordinasi yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program agar tidak terjadi kekuarangan informasi serta pemahaman implementator, selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi kepada semua masyarakat secara menyeluruh, agar masyarakat mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari program PNPM Mandiri Pariwisata yang dilaksanakan negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

2. Perlu adanya perhatian yang serius terkait dengan sumber daya manusia baik bagi pelaksana maupun penerima, dengan dilakukan pembinaan

dan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas SDM di desa wisata. Selain sumber daya anggaran perlu ditingkatkan dengan demikian masyarakat dapat meningkatkan usaha yang dijalankan dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

3. Perlu dilakukan penataan wilayah pada kedua negeri Amahusu dan Latuhalat sehingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata yang diberikan tepat sasaran.

4. Perlu adanya pelatihan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat sehingga mereka dapat berkerasi dan berinovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki pada bidang pariwisata

5. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dari instansi terkait Dinas Pariwisata Provinsi dan Dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan Syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenaan-Nya sehingga penulis dan Team dapat menyelesaikan artikel ini. Penulis menyadari bahwa banyak kekuarangan dalam menyusun artikel jurnal ini dan banyak pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini. Maka dalam kesempatan ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mau menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan dan dukungan berupa saran, motivasi yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Leo, 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung : Aipi
- Aderson dalam Widodo, 2007. Analisis Kebijakan . Cetakan Pertama. Jakarta PT. Gramedia Elex Media.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi ke dua. Yogyakarta: Gaja Mada University Press
- Elake Natanel, 2015. Kebijakan Publik dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir. Yogyakarta : The Phinisi Press
- Ealau dan Perit, 1973. Kebijakan Publik. Jakarta . Handal Niaga Pustaka
- Gromang Fras, 2003. Manajemen Kepariwisata. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Herdiansyah, Haris, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu - ilmu Sosial. Jakarta Salemba Humanika.
- Miles dan Huberman, 1992. Pusat Penelitian Ekonomi Litbang Bogor.
- Moleong Leky.J, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, Bambang dan Lina M. Jannah, 2005. Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi. Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Pandit S. Nyoman, 2003. Ilmu Pariwisata. Jakarta : Pradnya Paramita
- Wahap, Solichin, 1997. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara

2002. Kebijakan Negara . Jakarta PT Rineka Cipta 2008, Analisis Kebijakan Publik. Malang : UMM Press
- Winarno, Budi, 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta Media Pressindo , 2012. Kebijakan Publik Teori Proses dan studi Kasus. Jakarta : PT Buku Seru.